

Kebijakan Pembangunan Keluarga: Peluang Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pinky Saptandari

pinky_wisjubroto@yahoo.com

Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

Abstract

The Family institution today is increasingly important and strategic to push for changes in the building as well as strengthen the resilience and well-being of family members, including women and children. Fundamental changes for the realization of the resilience and well-being ang family member should start at the level of the family because the family is the smallest unit that plays an important role in building up or encourage a change in mindset, attitude and behavior of the community toward responsive mindset development family. When the community is encouraged to responsive to family development, then in it contained a human rights, gender perspective, empowerment and protection of women's rights, fulfillment and protection of children.

This paper is developed from the results of the study "Building Models of Family Resilience development policy towards the welfare of the family (a case study in East Java)", which was held in Malang by 2013. A study intended to assess the implementation of family development policy as well as opportunities to develop integrated policy development model family in Malang. Specifically, this paper highlights about development policy for strengthening family resilience and family welfare. Some of the issues raised in this paper, among others, were: the vulnerability of women and children in the family; deconstruction and the transformation of values in family development; parenting pattern in the resilience and family; family development policy; as well as development opportunities model policy development for the realization of the resilience of families and the welfare of the family. Through this paper is expected to encourage commitment to the development of models of development policies for strengthening family resilience and family welfare.

Keywords: *Model policies, deconstruction of social transformation, family values and alternative family models*

Abstrak

Pranata Keluarga semakin hari semakin penting dan strategis untuk mendorong perubahan dalam membangun serta memperkuat ketahanan serta kesejahteraan anggota keluarga, termasuk di dalamnya adalah perempuan dan anak. Perubahan mendasar untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan anggota keluarga harus dimulai dari tingkat keluarga karena keluarga merupakan unit terkecil yang memainkan peran penting dalam membangun atau mendorong perubahan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat menuju pola pikir yang responsif pembangunan keluarga. Ketika masyarakat didorong untuk responsif terhadap pembangunan keluarga, maka di dalamnya termuat perspektif hak asasi manusia, perspektif gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Makalah ini dikembangkan dari hasil penelitian "Membangun Model Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga Menuju Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Jawa Timur)", yang dilaksanakan di Kabupaten Malang tahun 2013. Suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga serta peluang untuk mengembangkan model kebijakan terpadu dalam pembangunan keluarga di Kabupaten Malang. Secara khusus, makalah ini menyoroti perihal kebijakan pembangunan keluarga untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Beberapa isu yang diangkat dalam makalah ini, antara lain adalah: kerentanan perempuan dan anak dalam keluarga; dekonstruksi dan transformasi nilai-nilai dalam pembangunan keluarga; ketahanan dan pola pengasuhan dalam keluarga; kebijakan pembangunan keluarga; serta peluang pengembangan model kebijakan pembangunan keluarga untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Melalui makalah ini diharapkan dapat mendorong komitmen untuk pengembangan model kebijakan pembangunan keluarga untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: model kebijakan, dekonstruksi sosial keluarga, transformasi nilai dan alternatif model keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dan sekaligus sebagai komunitas pertama bagi tumbuh kembang anak. Karenanya, keluarga dalam masyarakat memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun dan memperkuat mental serta karakteristik anak hingga tumbuh dewasa sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pranata keluarga memainkan peran penting dalam kesejahteraan keluarga, termasuk bagi tumbuhkembang dan perlindungan anak-anak secara fisik dan psikososial. Apa yang didapat seorang anak dalam keluarga akan mempengaruhi pertumbuhan fisik maupun perkembangan psikis. Dalam keluarga anak belajar bersosialisasi dan berbagi dengan seluruh anggota keluarga.

Arti penting peran keluarga, juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kebijakan, program serta anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan keluarga. Keluarga menjadi kelompok sasaran berbagai kebijakan dan program Pemerintah. Beberapa Kementerian/Lembaga membuat kebijakan dan program dengan kelompok sasaran keluarga, diantaranya adalah: BKKBN, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perem-

puan & Perlindungan Anak. BKKBN misalnya, melihat permasalahan kependudukan berasal dan diselesaikan di lingkup keluarga. Untuk itu, program keluarga Berencana (KB) menempatkan keluarga sebagai kelompok sasaran dalam pengendalian kependudukan.

Makalah ini dikembangkan dari hasil penelitian "Membangun Model Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga Menuju Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Jawa Timur)". Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Malang tersebut merupakan bentuk kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Lembaga Kajian Pembangunan Masyarakat pada tahun 2013. Suatu penelitian terkait implementasi Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya fokus pada mengkaji pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga serta peluang pengembangan model kebijakan pembangunan keluarga untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Keluarga memainkan peran penting, terutama untuk mengantarkan anak-anak Indonesia menjadi generasi yang berkualitas. Memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk dapat menjalankan fungsi perlindungan dan penga-

suhan dalam keluarga membutuhkan perubahan pola pikir, perubahan nilai-nilai budaya, norma, sikap dan perilaku dalam keluarga dan masyarakat agar dapat mendukung cita-cita mulia tersebut. Ketika proses kesadaran manusia menjadi pusat, disanalah kunci perubahan masyarakat diletakkan pada transformasi kebudayaan. Menurut Mudji Sutrisno (2005:71-72), transformasi kultural membutuhkan transformasi struktural baik politik maupun ekonomi. Menurutnya, tidaklah cukup transformasi nilai tanpa adanya transformasi struktural. Pengabaian tentang pentingnya transformasi struktural untuk menyertai transformasi kultural akan membuat sulit terwujudnya perubahan mendasar dalam pembangunan keluarga.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, penulis berpendapat bahwa dibutuhkan perubahan secara sistematis dalam pembangunan keluarga untuk ketahanan dan kesejahteraan, serta perbaikan kualitas pola pengasuhan dalam keluarga. Di mana perubahan tersebut dilakukan secara sistemik dengan transformasi kultural dan struktural secara bersama-sama. Hal ini dibutuhkan mengingat pranata keluarga mengalami pergeseran peran, fungsi dan ketahanan di tengah derasnya arus modernitas.

Di satu sisi, keluarga berpeluang menjadi sarana mewujudkan suatu lingkungan sosial budaya yang kondusif bagi kemajuan bangsa, khususnya bagi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan perubahan mendasar di tataran pola pikir (*mindset*), yang menyentuh wilayah nilai-nilai budaya maupun perubahan pada tataran struktural yang mendukung perubahan kebijakan maupun perilaku dalam masyarakat.

Patut dikritisi perihal konstruksi sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat tentang keluarga, serta konstruksi sosial budaya tentang peran anggota keluarga. Tentang peran orangtua, peran laki-laki dan perempuan, nilai-nilai keperempuanan dan keibuan, peran anak, yang seringkali dibalut dengan mitos, stereotipe, stigma, dan pelabelan dalam berbagai aspek kehidupan. Konstruksi budaya dalam dominasi ideologi patriarki yang sarat dengan mitos, tabu, stereotipe dan stigma tentang perempuan yang dibangun dan dipertahankan dalam lingkup keluarga, perlu untuk diubah. Meminjam istilah Irwan Abdullah, dibutuhkan dekonstruksi sosial keluarga agar nilai-nilai keluarga, peran dan fungsi serta hubungan antar anggota keluarga dalam kesetaraan

dan keadilan, bukan sebaliknya dalam hubungan yang mendominasi.

Dalam buku *Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Haryatmoko mengingatkan bahwa dominasi adalah sebagai kejahatan moral dan kejahatan politik yang mendominasi melalui mitos, ingatan sosial dan imajinasi. Bahkan dominasi wacana membawa kekerasan simbolik dalam hubungan gender. Menurut Haryatmoko, kekerasan yang paling sulit diatasi adalah kekerasan simbolik beroperasi melalui wacana. Kekerasan simbolik terjadi karena pengakuan dan ketidaktahuan yang didominasi atau diatur. Hanya saja prinsip simbolik diketahui dan diterima, baik oleh yang menguasai maupun yang dikuasai. Prinsip simbolis ini berupa bahasa, cara berpikir, cara bekerja dan cara bertindak. Wacana patriarki merupakan kekerasan karena menjebak perempuan dengan menentukan cara melihat, merasakan, berpikir dan bertindak. Penguasaan atas wacana menjadikan dominasi laki-laki seakan seperti sesuatu yang alamiah dan bisa diterima. Pola hubungan dalam rumahtangga menggambarkan berlangsungnya afirmasi kekuasaan dan proses pengakuan dominasi dalam logika dominasi yang berjalan atas nama prinsip simbolik (2010:127-130).

Kerentanan Anak dan Perempuan

Telah banyak kebijakan maupun program yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak. Namun, masih ditemukan berbagai kendala dan tantangan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan kerentanan perempuan dan anak. Relatif masih rendahnya kualitas hidup serta kerentanannya perempuan dan anak dapat diamati dari: tingginya angka kematian ibu saat melahirkan maupun angka kematian pada bayi dan anak; tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga; belenggu kemiskinan yang mendorong perempuan dan anak harus berkorban untuk kelangsungan hidup keluarga, dan lain-lain. Data-data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ketimpangan gender berkontribusi terhadap rendahnya kualitas hidup serta kerentanan perempuan dan anak.

Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa anak adalah anggota keluarga yang paling rentan. Anak rentan untuk jatuh sakit dan mengalami gizi buruk, yang bahkan dapat berujung pada kematian sebagaimana dapat dilihat dari masih tingginya angka kematian bayi/anak. Anak juga rentan mengalami perlakuan atau pola pengasuhan yang salah

yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan narkoba atau terpapar dengan pornografi. Anak juga rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Data-data yang ada menunjukkan bahwa rumah bukan tempat yang aman bagi anak, karena anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarga.

Kerentanan kondisi kesehatan anak dipicu oleh permasalahan sosial dan budaya, sebagai berikut, antara lain: (i) adanya cara pandang dan perilaku bias gender dalam keluarga dan masyarakat tentang status dan kedudukan laki-laki dan perempuan. Antara lain berupa perlakuan yang cenderung membedakan dalam pemenuhan hak pada anak laki-laki dan hak anak perempuan. Anak laki-laki cenderung mendapat perlakuan istimewa dalam keluarga sebagaimana konstruksi sosial yang berlaku dalam masyarakat. Perlakuan istimewa terhadap anak laki-laki juga berpengaruh terhadap pola pemberian makan yang cenderung ada perbedaan terhadap kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan kepada anak laki-laki dibandingkan apa yang diberikan kepada anak perempuan; (ii) masih tingginya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian anak (AKA) yang dipicu oleh adanya keyakinan dan kebiasaan dalam masyarakat bahwa tanggung jawab

untuk kesehatan anak dan tumbuh-kembang anak dianggap sebagai urusan seorang ibu semata, di mana kontribusi laki-laki relatif rendah; (iii) terdapat mitos dan tabu tentang makanan maupun pemenuhan gizi yang ditujukan bagi bayi, balita, anak dan remaja yang berpengaruh terhadap pola pemberian makan pada anak yang sangat kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan lingkungan alam setempat; (iv) fakta meningkatnya angka kekerasan (fisik, psikis, seksual) dan trafiking terhadap perempuan dan anak-anak.

Berdasarkan uraian tentang permasalahan kerentanan kesehatan anak dalam keluarga, terlihat bahwa faktor-faktor sosial dan budaya memberi sumbangan yang besar terhadap kerentanan mereka. Adapun akar permasalahan kerentanan anak dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain: kemiskinan, ketimpangan gender dalam dominasi budaya patriarki, serta rendahnya status dan posisi tawar anak dalam keluarga dan masyarakat. Penjelasan perihal kerentanan kesehatan anak tersebut menjadi petunjuk bahwa hak-hak dasar anak belum terpenuhi. Suatu hal yang memprihatinkan mengingat kesehatan anak adalah salah satu target Pembangunan Millenium atau MDGs yang seharusnya jadi prioritas pembangunan.

Berbagai tulisan menunjukkan betapa besarnya peran dan posisi perempuan dalam keluarga. Namun, peran penting tersebut juga diwarnai kerentanan dalam kesehatan hingga kerentanan untuk mengalami berbagai bentuk kekerasan. Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2008, mencatat 60% pengelola struktur pengeluaran rumah tangga adalah perempuan. Perempuan menjadi aktor yang bertanggung jawab untuk mengelola, tak hanya peran pengasuhan, tetapi juga ekonomi rumah tangga (Keluarga). Berbagai cara dilakukan perempuan untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga, mulai dari menikah, menjadi gundik, berhutang, spiritual, hingga menjadi buruh migran (Laporan Komnas Perempuan, 2008).

Atnike Nova Sigiros, dalam tulisan tentang "Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga di Indonesia: Kritik Atas Model Keluarga Lelaki sebagai Pencari Nafkah Utama", yang dimuat dalam *Jurnal Perempuan* Nomor 73 tahun 2012, menjelaskan bahwa posisi perempuan dalam pengelola keluarga sangat penting sekaligus rentan. Sigiros juga menganalisis apakah posisi perempuan dalam kebijakan dalam kebijakan negara, dalam bidang kesejahteraan keluarga, telah menempatkan perempuan

dalam posisi yang adil. Disimpulkan bahwa posisi perempuan dalam kebijakan Pemerintah di bidang kesejahteraan keluarga masih sebagai penerima kebijakan semata, yang jumlah dan cakupannya juga masih terbatas. Perempuan dan sebagian besar penduduk miskin yang hidup dari sektor ekonomi informal pada umumnya tidak masuk dalam skema jaminan sosial. Kebijakan sosial bagi perempuan dalam unit keluarga masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan, sebagai konsekuensi dari model keluarga dengan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Jaminan hak perempuan (bahkan anak) ditentukan oleh keabsahan dan relasi mereka dengan suami sebagai kepala keluarga (*Jurnal Perempuan*, 2012:7-16).

Target MDGs untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2015 masih sulit dicapai karena kecenderungan naiknya AKI di Indonesia. Kemiskinan juga dianggap berwajah perempuan dan berdampak pada buruknya kesehatan reproduksi perempuan. Hal tersebut disampaikan *Women Research Institute* (WRI), berdasarkan penelitian di 7 wilayah. Melalui penelitian tersebut, WRI menyimpulkan bahwa perempuan adalah sosok yang menanggung kemiskinan. Perempuan di wilayah pedesaan sesungguhnya merupakan penggerak roda ekonomi

pasar tradisional, selain juga sebagai sosok yang memikul berbagai beban nilai sosial dan budaya, dan cenderung terbatas akses mereka ke dunia publik. Perempuan juga cenderung diposisikan lebih tidak bermakna jika dibandingkan dengan laki-laki. Nilai-nilai sosial budaya telah membentuk cara pikir masyarakat dalam memaknai perempuan. Pemaknaan ini dalam prakteknya ikut memberi pengaruh terhadap pemaknaan arti kesehatan bagi perempuan. Kondisi ini memiliki kecenderungan yang merugikan kaum perempuan, terutama mengenai nilai kesehatan reproduksi mereka (2010:223-332).

Dekonstruksi dan Transformasi Nilai-Nilai Keluarga

Ketika kebijakan pembangunan dianggap tidak ramah terhadap perempuan dan anak, maka diharapkan ada perubahan kebijakan yang memuat perubahan-perubahan mendasar. Tujuannya adalah agar perempuan dan anak sebagai kelompok rentan tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan secara pasif. Diperlukan perubahan mendasar, yang antara lain melalui pembangunan keluarga, di mana dilakukan proses transformasi nilai-nilai keluarga, khususnya dengan memasukkan nilai-nilai responsif gender.

Upaya transformasi nilai-nilai keluarga merupakan proses penting yang membutuhkan payung hukum dari tingkat nasional hingga tingkat desa. Munculnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai lembaga pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Menteri No. 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, diharapkan dapat memberi warna yang berbeda dalam pembangunan keluarga. Di mana permasalahan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta perlindungan dan hak anak didorong untuk menjadi prioritas penting dalam membuat perubahan mendasar tersebut.

Perubahan mendasar untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan anggota keluarga memang harus dimulai dari tingkat keluarga. Mengapa demikian? Karena keluarga merupakan unit terkecil yang memainkan peran penting dalam membangun atau mendorong perubahan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat menuju pola pikir yang responsif pembangunan keluarga. Ketika masyarakat didorong untuk responsif dalam pembangunan keluarga, maka di dalamnya diharapkan termuat juga perspektif hak asasi manusia, kesetaraan gender, pemberdaya-

an dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Masyarakat yang responsif pembangunan keluarga dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, menunjukkan bahwa pembangunan keluarga bukan semata-mata sebagai proses transformasi kebudayaan, melainkan juga sebagai suatu proses membangun keluarga Indonesia yang modern dan beradab. Tujuan pembangunan keluarga antara lain agar anak-anak dan seluruh anggota keluarga cinta budaya dan tanah air, menghargai perbedaan, memiliki toleransi, menghargai hak-hak asasi manusia, serta menjauhi kekerasan. Dapat disebutkan bahwa membangun keluarga adalah membangun peradaban bangsa Indonesia.

Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Naya Sudjana yang ditulis dalam artikel "Membangun Keluarga Indonesia Masa Depan Yang Modern dan Beradab", yang dimuat dalam *Buku Bunga Rampai Masalah Anak, Gender & Multikulturalisme*. Dikatakan bahwa dunia sedang dilanda oleh suatu kekacauan peradaban (*the Chaos of Civilization*) yang maha dahsyat (istilah Albert Camus, Michael Foucault), di mana nilai-nilai budaya dan kehidupan manusia menjadi

tidak jelas dan pasti. Yang benar menjadi salah, yang baik menjadi buruk, atau sebaliknya. Akibat kekacauan peradaban umat manusia kemudian mendatangkan dan mengakibatkan suatu gejala kematian moralitas manusia (*the death of morality*). Kejujuran dan kepribadian keadilan telah hilang. Rasa malu dan dosa telah menjauh. Egoisme liberal muncul di mana-mana dan menghilangkan solidaritas sosial dalam masyarakat. Naya Sudjana menyampaikan bahwa pembentukan dan pembangunan keluarga modern dan beradab (*modern and civilized family*) menjadi hal yang paling penting dewasa ini di tengah kehidupan umat manusia yang mengalami keterbukaan, globalisasi dan persaingan hidup yang sangat ketat. Pembangunan nasional dan perubahan sosial harus mampu mengantarkan keluarga Indonesia menjadi keluarga yang modern dan beradab (2006:203-2006).

Pandangan Naya Sudjana tentang kematian moralitas manusia dalam kaitan dengan keluarga juga dirasakan oleh Irwan Abdullah, sebagaimana ditulis dalam tulisan yang berjudul *Modernitas dan Titik Balik Keluarga*, dalam buku *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Abdullah menyampaikan bahwa keluarga tidak lagi menjadi tanda dari adanya sebuah kebudayaan, tetapi menjadi wakil

dari sebuah dunia yang ada di luarnya. Keluarga sedang mengalami kematian. Kematian keluarga merupakan suatu proses sosial yang bukan sekedar menunjukkan suatu titik akhir dari suatu peradaban yang diagung-agungkan, tetapi lebih sebagai kegagalan sejarah dalam memelihara institusi yang hampir paling penting dalam penciptaan sistem sosial dan nilai yang agung bagi suatu wilayah kebudayaan. Lebih lanjut, Abdullah mempertanyakan, apakah keluarga dapat dianggap sebagai masa lalu, pada saat otoritas tidak terletak pada keluarga, tetapi di luar keluarga itu. Lokasi keluarga mulai bergeser ke luar batas-batas keluarga. Pada saat *industrial labour* masuk melalui kapitalisme menggantikan *family labour* yang telah eksis selama berabad-abad, maka keluarga mulai kehilangan otoritas. Kepala Keluarga yang semula memiliki peran dan kekuasaan hampir tak terbatas dalam mengatur sikap dan tindakan yang ideal yang harus diperlihatkan anggota-anggotanya, kemudian harus tunduk pada kekuasaan diluar keluarga. Dikatakan bahwa keluarga, tidak hanya berhadapan dengan Negara, tetapi juga terlibat dalam jaringan yang lebih kompleks yang melibatkan pasar. Relasi antara *state*, *market*, dan *society* inilah yang menjadi basis ideologi bagi praktik-praktik sosial yang men-

definisikan keluarga sebagai lokasi konsumsi. Keluarga bukan sekedar tempat berbagai program pemerintah dijalankan, termasuk KB, tetapi juga program-program pasar yang melibatkan anggota-anggotanya dalam proses konsumsi masalah. Lemahnya otoritas orangtua dan hilangnya fungsi tradisional keluarga mendapat dukungan pada saat posisi mesin dan teknologi menjadi semakin penting dari waktu ke waktu yang cara kerjanya dan nilai-nilai yang melekat sangat mempengaruhi ritme kehidupan dan norma-norma yang terbentuk (2006:153-164).

Pemikiran Abdullah tentang menuju ke suatu titik balik keluarga untuk mengatasi "kematian keluarga" tersebut, agaknya relevan dengan pemikiran Mudji Sutrisno perihal pentingnya transformasi kebudayaan sebagai kunci perubahan masyarakat termasuk di dalamnya adalah dekonstruksi sosial keluarga (2005:71-72).

Sjafri Sairin dalam buku *Riak-Riak Pembangunan Perspektif Antropologi* (2010:3-15), menguraikan perihal transformasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat diterapkan dalam pembangunan keluarga sebagai bagian dari pengelolaan kebudayaan Indonesia untuk masa depan. Sairin juga menjelaskan bahwa mengelola kebudayaan difokuskan kepada

cultural behavior. Dikatakan bahwa pengetahuan tentang nilai-nilai diperoleh melalui transmisi yang berlangsung dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Pada masyarakat sederhana yang relatif masih tertutup (*closed community*), proses transmisi budaya itu berlangsung melalui tradisi lisan dalam keluar, seperti keluarga luas (*extended family*) dan kelompok sosial sekitarnya. Pada masyarakat terbuka yang telah mengenal teknologi komunikasi dan informasi modern, proses belajar itu tidak lagi semata-mata melalui proses transmisi nilai budaya melalui lingkungan sosial terbatas, tetapi telah berada jauh di luar itu. Proses belajar itu tidak lagi terbatas pada transmisi nilai dalam lingkungan sekitar yang terbatas, tetapi telah bergeser pada transformasi gagasan yang datang dari luar lingkungannya sendiri. Tanpa disadari proses transformasi nilai dari luar itu mempengaruhi pola budaya masyarakat.

Dalam konteks penanaman nilai-nilai dalam keluarga, nilai-nilai baru yang diadopsi dari luar lingkungan itu seringkali tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang sebelumnya sudah ada melalui proses transmisi dari generasi ke generasi. Menurut penulis, orang tua dituntut memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menjalankan peran men-

transformasikan nilai-nilai keluarga agar tidak terjadi konflik nilai, melainkan membuka peluang untuk terjadi pembentukan sistem nilai baru yang egaliter, termasuk nilai-nilai kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.

Dalam menjalankan peran mentransformasikan nilai keluarga, orang tua dituntut memiliki kemampuan untuk menggali serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal dengan pemikiran dan sikap kritis, dibarengi dengan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak, untuk pengembangan potensi yang dimiliki anggota keluarga termasuk anak-anaknya dalam kerangka pembangunan keluarga.

Dekonstruksi dan transformasi nilai-nilai keluarga membutuhkan pemahaman tentang arti modernitas dan kreativitas. Menurut Benny H. Hoed (2008: 109-110), kreativitas inheren dalam modernitas. Kreativitas ada pada setiap orang dan perkembangannya tergantung dari apakah masyarakat itu sendiri memberi kesempatan untuk berkembang atau tidak. Dalam menghadapi arus globalisasi yang memang nyata, kita perlu mengambil sikap modern, dengan berani mendekonstruksi konsep-konsep yang masuk bersama globalisasi agar sesuai dengan

keadaan kita sendiri. Kreativitas harus berani membuka makna-makna baru.

Mengacu pendapat Benny H. Hoed tentang pentingnya kreativitas untuk membuka makna-makna baru dari masuknya nilai-nilai baru melalui globalisasi, penulis beranggapan bahwa perlu ada pemaknaan baru tentang pembaharuan nilai-nilai keluarga. Pemaknaan baru tentang pembaharuan nilai-nilai keluarga dimaksudkan agar keluarga tidak terjebak pada asal "modern", tetapi juga tidak tersandera "konservatisme" yang sempit.

Transformasi nilai-nilai kearifan lokal budaya bangsa untuk pembangunan keluarga dapat digali dan dikembangkan dari berbagai sumber budaya. Studi-studi etnografi dapat digunakan sebagai suatu peluang untuk mengungkap kearifan lokal tentang nilai-nilai keluarga yang kerap kali terpendam atau terpinggirkan karena kecenderungan pragmatisme dan materialisme. Penanaman dan revitalisasi nilai-nilai keluarga untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber budaya seperti dongeng/cerita rakyat, pepatah, wewarah, pantun, norma. Dibutuhkan panduan untuk revitalisasi, dekonstruksi serta transformasi nilai-nilai budaya bangsa untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Modul

pendidikan karakter dan pekerti bangsa bagi keluarga melalui kelompok perempuan yang diterbitkan oleh Departemen Kebudayaan & Pariwisata tahun 2005 maupun Modul yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2007, dapat digunakan sebagai bagian dari pembangunan keluarga. Melalui kegiatan berbagai pelatihan diharapkan tujuan pembangunan keluarga dapat terwujud. Walaupun modul pendidikan karakter itu ditujukan pada kelompok perempuan, namun sasaran akhirnya adalah membangun ketahanan keluarga.

Beragam permasalahan serta konflik budaya yang menyertai perjalanan bangsa membutuhkan suatu tekad kuat untuk membangun nilai-nilai kebangsaan serta paradigma budaya yang mampu memberi makna baru untuk membangun Ke-Indonesia-An. Dalam hal inilah keluarga adalah pranata yang memainkan peran strategis untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan untuk membangun Ke-Indonesia-An Hal ini dianggap penting, karena pada dasarnya Nasionalisme tidak pernah konstan, ia selalu memperbaharui diri, dan pada saat yang sama mendukung dan sekaligus didukung oleh berbagai institusi sosial yang membentang dari keluarga, sekolah, pemerintah, agama formal, dan juga media massa. Edi Sedyawati

(2008), menuangkan gagasan tersebut dalam buku yang berjudul "Ke-Indonesia-An dalam Budaya", yang menjelaskan tentang perlunya dilakukan suatu perumusan kembali Nasionalisme Indonesia dalam paradigma budaya, yang dapat dilaksanakan melalui berbagai institusi sosial, antara lain melalui keluarga.

Ketahanan dan Pola Pengasuhan

Dalam pembangunan berbasis keluarga, salah satu indikator penting adalah ketahanan dan pola pengasuhan dalam keluarga. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.

Pengasuhan berasal dari kata asuh, yang mempunyai arti menjaga, merawat, dan mendidik anak yang masih kecil menekankan bahwa tiga komponen, yaitu: Asah (kebutuhan akan stimulasi kognitif), Asih (kebutuhan akan kasih sayang), dan Asuh (kebutuhan fisik-biomedis) yang merupakan faktor-faktor yang berperan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.

Pola pengasuhan meliputi 6 hal, yaitu (1) perhatian/dukungan ibu terha-

dap anak, (2) pemberian ASI atau makanan pendamping pada anak, (3) rangsangan psikososial pada anak, (4) persiapan dan penyimpanan makanan, (5) praktek kebersihan dan sanitasi lingkungan, dan (6) perawatan anak dalam keadaan sakit seperti mencari pelayanan kesehatan. Mengacu pada konsep dasar tumbuh kembang anak, maka pengasuhan adalah upaya dari lingkungan agar kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang (asuh, asih, asah) dapat terpenuhi dengan baik dan benar, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Anak dapat dilihat sebagai awal mata rantai kehidupan manusia yang menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa di masa depan. Menyiapkan generasi berkualitas berarti membangun dan mensejahterakan kehidupan anak sedini mungkin agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, cerdas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ketahanan dan otonomi keluarga saat ini mendapat tantangan yang sangat besar akibat perubahan yang sangat cepat, khususnya dengan masuknya teknologi komunikasi dan informasi. Untuk itulah, dirasakan pentingnya disusun suatu kebijakan, yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam mem-

bangun dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Kebijakan Pembangunan Keluarga

Telah ada Undang Undang No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Namun, baru difokuskan pada urusan perkembangan kependudukan. Sedangkan pembangunan keluarga belum mendapat perhatian serius. Padahal kita semua tahu bahwa keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dibutuhkan adanya Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Menteri agar Undang Undang No.52 Tahun 2009 tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam peraturan pelaksanaan dalam pembangunan keluarga dirasakan pentingnya kejelasan konsep dan strategi pengintegrasian pembangunan keluarga sebagai bagian dari pembangunan manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam pelaksanaan pembangunan keluarga membutuhkan kejelasan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di tingkat pusat maupun daerah, terutama dikaitkan dengan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak yang sudah

ada sampai dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Desa.

Kebijakan Pembangunan Keluarga juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mensukseskan target MDGs. Khususnya untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, serta mengatasi kemiskinan. Walaupun target MDGs untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2015 masih sulit dicapai. Setidaknya upaya mengatasi AKI dan AKB dapat diintegrasikan sebagai target pelaksanaan dalam kebijakan pembangunan keluarga.

Agar pembangunan keluarga dapat benar-benar menjadi komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 06 Tahun 2013, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Keluarga, yang bertujuan untuk: (i) mendorong penerapan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan perspektif gender pada semua kegiatan pembangunan yang sarannya untuk keluarga; (ii) mendorong peningkatan pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga pada masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa; (iii) mengembangkan ke-

bijakan baru untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraan. Dalam pengembangan kebijakan pelaksanaan pembangunan keluarga diharapkan berpedoman pada konsep ketahanan dan kesejahteraan yang didalamnya mencakup: landasan legalitas dan keutuhan keluarga; ketahanan fisik; ketahanan ekonomi; ketahanan sosial psikologi; dan ketahanan sosial budaya (dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri PPPA No.6/2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga).

Lahirnya Peraturan Menteri PPPA tersebut merupakan peluang untuk mewujudkan pembangunan keluarga responsif gender masuk dalam kebijakan dan program pemerintah, serta mendapat porsi alokasi anggaran dari pemerintah di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga tingkat Desa. Perihal tingkat Desa peluang dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang baru saja diluncurkan pada awal bulan Januari 2014.

Peraturan tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga dikeluarkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan agar pembangunan keluarga dapat menjadi sa-

rana untuk mengatasi berbagai permasalahan, termasuk rendahnya kualitas hidup serta kerentanan pada perempuan dan anak, termasuk mengatasi AKI dan AKB. Pembangunan keluarga ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, serta seluruh anggota keluarga. Pembangunan keluarga tidak dimaksudkan untuk membuat perempuan menjalankan peran domestik semata-mata, tetapi sebaliknya menjadi sarana untuk mendekonstruksi pembagian peran dalam keluarga yang masih timpang menuju pembagian peran gender yang lebih setara dan berkeadilan.

Memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan keluarga tidak cukup dengan membuat peraturan yang mencantumkan kata kesetaraan gender. Melainkan juga membutuhkan operasionalisasi konsep kesetaraan gender dan pada tataran pelaksanaan, yang diiringi juga dengan penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, dilengkapi dengan pendampingan dan monitoring evaluasi. Semuanya itu perlu dilakukan untuk memastikan suatu pembangunan keluarga yang responsif gender.

Munculnya berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender tersebut tidak serta merta membuat hak-hak perempuan terpenuhi dan diskriminasi gender ber-

akhir. Menurut Irwan Abdullah, dalam buku *Sangkan Paran Gender* (2003:3-4), masih merupakan jalan panjang pencarian identitas perempuan dari domestik ke publik. Dalam buku tersebut Irwan Abdullah melihat tiga hal yang menarik diperhatikan, yang juga merupakan "pilihan" dalam melihat persoalan perempuan. Pertama, Bagaimana dikotomi domestik dan publik (seperti *nature* dan *culture*) itu terbentuk dalam konteks tertentu. Pertanyaan ini mengarah kepada pencarian determinan atau kekuatan-kekuatan dua domain kemudian merupakan dua wilayah kekuasaan yang menggambarakan dominasi dan subordinasi; Kedua, proses-proses sosial, budaya, ekonomi dan politik apa yang menyebabkan dikotomi domestik-publik menguat dan dilestarikan terus menerus sebagai realitas yang tidak perlu dipertanyakan keabsahannya; Ketiga, dalam hal apakah ekspansi dari sektor domestik ke sektor publik dapat terjadi dan apa arti perubahan semacam ini dalam melihat pergeseran masyarakat secara umum. Bagi Abdullah, perdebatan domestik publik hanya merupakan salah satu "jalan masuk" untuk melihat kembali pembentukan realitas sosial, ekonomi dan politik perempuan.

Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan perhal perspektif gender –da-

pat dilaksanakan oleh Pemerintah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Desa maupun dilaksanakan masyarakat. Sebagai contoh, dapat dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai banyak program-program pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan. Seperti program Bimbingan Teknik Program Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri yang diadakan di beberapa daerah dapat menjadi pintu masuk yang sangat strategis sebagai upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga hingga tingkat desa.

Pentingnya pengaturan tentang pembangunan keluarga, mengisyaratkan bahwa tidak cukup apabila indeks pembangunan hanya dikembangkan dari indeks pembangunan manusia (IPM) saja. Dirasakan penting untuk membangun Indeks Pembangunan Keluarga (IPK), di mana indikator-indikator yang digunakan adalah pembangunan berbasis keluarga. Pentingnya indeks pembangunan yang dikembangkan dari basis keluarga tersebut disampaikan Sonny Harry Harmadi, Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pada Seminar Nasional "*Paradigma Baru Pembangunan Nasional: Membangun Indonesia Masa*

Depan Berbasis IPTEK", yang diselenggarakan di Ruang Auditorium Lemhannas RI, pada tanggal 8 Mei 2013.

Dalam pembangunan berbasis keluarga, salah satu indikator penting adalah ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pola pengasuhan dalam keluarga. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, kemampuan untuk hidup mandiri dan pengembangan diri dan keluarga, kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga, untuk meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Peluang Pengembangan Model Kebijakan Pembangunan Keluarga

Agar Undang Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 06 tahun 2013 dapat dilaksanakan dengan baik, maka dibutuhkan pengembangan langkah-langkah strategis. Antara lain, dengan mengembangkan model kebijakan pembangunan keluarga untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pengembangan model terpadu antar instansi terkait pembangunan keluarga, dikutip dari hasil laporan penelitian "Membangun Model Kebijakan Pembangunan Keluarga Menuju Kesejahteraan Keluarga" (2013). Dalam model yang dikembangkan antar instansi terkait yang mengambil wilayah penelitian di Kabupaten Malang diperoleh temuan, sebagai berikut.

Pertama, pendidikan dalam keluarga dikerjakan oleh banyak instansi terkait baik lembaga pemerintah melalui SKPD terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kementerian Agama), juga juga dikerjakan oleh lembaga masyarakat (PKK, Aisyiyah, Fayata NU, dll). *Kedua*, perlindungan kesehatan keluarga dikerjakan beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah seperti: Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Puskesmas, Posyandu, Perguruan Tinggi, Unicef, PKK, Aisyiyah, Fatayat NU, Pengajian Al Hidayah, serta beberapa Yayasan yang bergerak dalam bidang kesehatan (Yayasan Gerontologi, PKBI, dll).

Ketiga, Keluarga Berencana. Walaupun *leading sector* ada pada BKKBN, namun tetap membutuhkan koordinasi antar instansi terkait. Dalam hal ini koordinasi BKKBN dilakukan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten, serta berbagai lembaga ma-

syarakat seperti PKK, PKBI, LKK NU, Fatayat NU, dan lain-lain. *Keempat*, pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki cakupan yang sangat luas dan membutuhkan koordinasi dan sinergitas dengan beberapa SKPD terkait dan lembaga masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPKB), Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, P2TP2A, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, *Women Crisis Center*, Pusat Studi Wanita/Gender di Perguruan Tinggi, dan lain-lain.

Kelima, kabupaten Malang adalah salah satu daerah asal Buruh Migran Perempuan, yang memasok sekitar 6-8% BMP asal Jawa Timur ke berbagai Negara, seperti Hongkong dan Arab Saudi. Kontribusi BMP untuk pembangunan ekonomi sangat besar, dapat dilihat dari berkembang pesatnya pembangunan di wilayah tempat tinggal mereka. 50% dari jumlah keluarga yang ada di wilayah kabupaten Malang memiliki anggota keluarga sebagai buruh migran, atau pernah menjadi buruh migran di beberapa negara. Menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi buruh migran terkait keluarga, termasuk tumbuh kembang anak. Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat program Bina Keluarga TKI di Kabupaten Malang sebagai percontohan manajemen pengelolaan keluarga pada keluarga Buruh Migran yang dilaksanakan secara responsif gender, serta bertanggung jawab atas tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Keenam, tingginya angka perceraian perkawinan di Kabupaten Malang merupakan suatu permasalahan yang cara mengatasinya membutuhkan penyelesaian di tingkat keluarga. Tingginya angka perceraian juga masih terkait dengan buruh migran. Sehingga solusi mengatasinya juga bisa dilewatkan melalui program Bina Keluarga TKI. *Ketujuh*, program-program pembangunan keluarga untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan telah dilaksanakan di Kabupaten Malang, antara lain: Bina Keluarga Balita (BKB); Bina Keluarga Remaja (BKR); Bina Keluarga Lansia (BKL); Generasi Berencana (GENRE); Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); Bina Keluarga TKI (BKT).

Kedelapan, pada tahun 2013 Kabupaten Malang mencanangkan sebagai tahun kualitas yang meliputi program pendewasaan usia perkawinan, ketahanan keluarga, bina keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal ini menun-

jukkan tingginya komitmen untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait di Kabupaten Malang dalam membangun model kebijakan Pembangunan Keluarga untuk memperkuat Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Kesembilan, melalui kegiatan FGD Penyusunan Desain Model Program Terpadu Antar Instansi terkait untuk Membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang dilaksanakan di Kabupaten Malang, teridentifikasi beberapa hal penting, yakni: (i) adanya kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi antara prioritas kebutuhan masyarakat dengan berbagai program yang tersedia dari masing-masing instansi; (ii) program yang dipilih untuk diadakan sinkronisasi dan menjadi prioritas diharapkan yang benar-benar sesuai. Sehingga program yang berorientasi proyek dan tidak signifikan harus dihilangkan; (iii) beberapa program yang pelaksanaannya bersifat *overlapping* antar instansi diambil salah satu yang paling sesuai atau disinkronisasikan antar instansi. Dengan tidak adanya program yang *overlapping*, maka koordinasi antar instansi untuk membangun model program terpadu dalam pembangunan keluarga dapat dilaksanakan dengan baik; (iv) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan BKKBN, diha-

rapkan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif hingga ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dianggap penting, karena pembangunan keluarga untuk ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat terwujud apabila ada koordinasi yang baik antara dua lembaga yang memainkan peran penting dan strategis. Koordinasi diharapkan dapat dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring evaluasi; (v) kemitraan antara instansi terkait dengan Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan harus diperkuat untuk membangun kesadaran dan peranserta masyarakat, termasuk untuk meningkatkan kapasitas SDM maupun kelembagaan dalam melaksanakan pembangunan keluarga; (vi) hambatan berupa ego sektoral masing-masing instansi diharapkan dapat dihilangkan, sehingga koordinasi antar instansi terkait dapat ditingkatkan dalam mengemban amanah pelaksanaan pembangunan keluarga.

Sebagaimana dikutip dari hasil penelitian "Membangun Model Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga Menuju Kesejahteraan Keluarga" (2013), pengembangan model kebijakan (*Policy Model*) pembangunan keluarga menggunakan model yang dikembangkan Gass dan Sisson (1974). Dalam buku tersebut,

Gass dan Sisson menjelaskan model kebijakan sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan dapat digunakan tidak hanya untuk menjelaskan dan memprediksi elemen-elemen suatu kondisi masalah, melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Dikatakan bahwa model kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang esensial dan tidak esensial dari situasi masalah, mempertegas hubungan diantara faktor-faktor atau variabel-variabel penting dan membantu menjelaskan serta mempredikdikan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan kebijakan.

Hasil penelitian di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Malang yang sangat tinggi dalam pembangunan keluarga menjadi peluang untuk dikembangkan sebagai model percontohan pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan disampaikan beberapa catatan sebagai rangkuman makalah, se-bagai berikut. *Pertama*, Perubahan men-dasar untuk mewujudkan ketahanan

dan kesejahteraan anggota keluarga memang harus dimulai dari tingkat keluarga ka-rena keluarga merupakan unit terkecil yang memainkan peran penting dalam membangun atau mendorong perubahan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat menuju pola pikir yang responsif pem-bangunan keluarga. Ketika masyarakat didorong untuk responsif dalam pem-bangunan keluarga, maka di dalamnya termuat juga perspektif hak asasi ma-nusia, perspektif gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pe-menuhan hak dan perlindungan anak. Dibutuhkan pemikiran kritis diiringi lang-kah-langkah konkrit untuk merevitalisasi, mendekonstruksi, dan mentransformasi secara kultural dan struktural agar per-ubahan mendasar dapat diwujudkan da-lam pembangunan keluarga.

Kedua, Permasalahan serta upaya-upaya yang telah dan sedang dilaksanakan di beberapa daerah, termasuk yang di-laksanakan di Kabupaten Malang dalam kebijakan dan program pembangunan ke-luarga, merupakan kondisi dan potensi yang berpeluang untuk dikembangkan sebagai model kebijakan pembangunan keluarga. Model kebijakan pembangunan keluarga yang dikembangkan dari Studi Kasus di Kabupaten Malang dapat diguna-kan untuk menjelaskan dan memprediksi

suatu kondisi masalah, sekaligus juga dapat bermanfaat untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada. Sekaligus merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah yang ada.

Ketiga, dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat sistematis dengan koordinasi dan sinergitas yang baik antar instansi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan keluarga. Khususnya, untuk membuat desain model percontohan pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan Keluarga, agar dapat dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan kekhasan setiap wilayah. Pada setiap daerah dapat dikembangkan model kebijakan pembangunan keluarga yang bersifat spesifik sesuai dengan kekhasan lokal. Di Kabupaten Malang yang dikenal banyak buruh migran, khususnya buruh migran perempuan, dapat dibuat model percontohan kebijakan pembangunan keluarga berupa Bina Keluarga TKI. Dengan panduan yang jelas, manajemen pengelolaan keluarga pada keluarga Buruh Migran melalui program Bina Keluarga TKI, diharapkan dapat dilaksanakan secara responsif gender, serta bertanggung jawab atas tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan, 2003, *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar untuk Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada (cet ii).
- _____, 2006, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Arif Aris Mundayat, 2010, Edriana Noerdin, Erni Agustini, Sita Aripurnami & Sri Wahyuni, *Target MDGs Menurunkan AKI tahun 2015 Sulit Dicapai*, Jakarta: Penerbit Women Research Institute.
- Atnike Nova Sigiro, *Perempuan dan kesejahteraan Keluarga di Indonesia: Kritik Atas Model Keluarga 'Lelaki Sebagai Pencari Nafkah Utama'*, dalam **Jurnal Perempuan** Edisi ke-73, Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, April 2012.
- Gass, Saul I dan Roger L Sisson (ed)., 1974. *A Guide to Models In Governmental Planning and Operations*, Washington DC: Office of Research and Development Environmental Protection Agency.
- Haryatmoko, 2010, *Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Hoed H Benny, 2008, *Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya*, Depok: Penerbit FIB UI.
- Komnas Perempuan (2008), "Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual: Di Rumah, Institusi Pendidikan, dan Lembaga Negara – Catatan

- Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008". Komnas Perempuan: Jakarta.
- Laporan Akhir Penelitian (belum dipublikasikan), "**Membangun Model Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga Menuju Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Jawa Timur)**". Lembaga Kajian Pembangunan Masyarakat bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, tahun 2013.
- Otto, Herbert A, 1970, ***The Family in Search of A Future Alternate Models for Moderns***, New York: Appleton-Century-Crofts Educational Division Meredith Corporation.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, diterbitkan pada tahun 2013.
- Sairin Sjafrin, 2010, ***Riak-Riak Pembangunan Perspektif Antropologi***, Yogyakarta: Penerbit Media Wacana.
- Saptandari, Pinky, Trijoko & Nurcahyo TA, 2005, ***Modul Pendidikan Karakter & Pekerti Bangsa bagi Kelompok Perempuan***, Jakarta: Departemen Kebudayaan & Pariwisata.
- Sedyawati Edi, 2008, ***KeIndonesiaAn dalam Budaya*** Buku 2, Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Satra.
- Sudjana Naya, 2006, "Membangun Keluarga Indonesia Masa Depan Yang Modern Dan Beradab", dalam Yusuf Ernawan (eds), ***Bunga Rampai Masalah Anak, Gender & Multikulturalisme***. Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media.
- Sutrisno Mudji & Hendar Putranto (ed), 2005, ***Teori-Teori Kebudayaan***, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.